

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI E-MONOGRAFI DATA ADMINISTRASI DESA KEDUNGPELUK KECAMATAN CANDI

Suci Megawati¹, Tauran², Indah Prabawati³, Badrudin Kurniawan⁴, Ahmad Nizar Hilmi⁵,
Luci Fransiska⁶, Yoan Wandan Sari⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
e-mail: sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi *online* namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tantangan pelayanan publik yang dihadapi semakin kompleks dengan adanya pandemi Covid-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap beroreintasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk membantu Pemerintah Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam pengoperasian aplikasi website desa atau Sistem Informasi Desa (SID). Pentingnya pengembangan ini untuk membantu pemerintah desa melakukan aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat yang mana diarahkan untuk dilakukan berbasis digital di era new normal ini. Pemerintah desa sudah berupaya melakukan pengembangan namun belum berhasil karena beberapa kendala antara lain keterbatasan infrastruktur, SDM, dan finansial. Oleh karena itu target dari kegiatan ini yaitu meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam pengoperasian aplikasi website desa atau SID Desa Kedungpeluk. Selain membantu mengembangkan aplikasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa dan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pelayanan Desa, Pelayanan Publik, Pengoperasian Sistem Informasi Desa, Aplikasi Pelayanan.

Abstract

Digital transformation is broader than just turning services online and integrating all service areas. Public service is a series of activities fulfilling service needs by statutory regulations for every citizen and resident of goods, services, or administrative services as defined in Law no. 25 of 2009 concerning Public Services. The challenges facing public services are increasingly complex with the Covid-19 pandemic. There needs to be a breakthrough and innovative policies to overcome problems while still being oriented to the best public services provided to the community. The purpose of this activity is to assist the Government of Kedungpeluk Village, Candi District, Sidoarjo Regency, in operating the village website application or Village Information System (SID). The importance of this development is to help the village government carry out public service activities to the community, which is directed to be digital-based in this new normal era. The village government has tried to develop it but failed due to several obstacles, including limited infrastructure, human resources, and finances. Therefore, this activity's target is to increase village officials' skills in operating the village website application or SID Kedungpeluk Village.. In addition to helping develop applications, this activity is also directed to provide training and assistance to village officials and the community in using and utilizing the application sustainably.

Keywords: Village Services, Public Services, Operation Of Village Information Systems, Service Applications.

PENDAHULUAN

Pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju pemerintah. Pemerintah telah menggencarkan prinsip Dilan “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan Dilan ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi *online* atau dengan membangun aplikasi.

Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. *United Nations* melalui “*E-Government Survey 2020*” telah merilis tingkat adopsi sistem e-government yang dilakukan berbagai negara. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu untuk lebih ditingkatkan dan menjadi hal yang penting. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi perhatian seluruh negara. Indonesia juga masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks SPBE ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan *e-government*.

Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks serta ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas dan clear memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemerintahan dibentuk antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Harapan akan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang murah, pelayanan bermutu dan pelayanan yang transparan. Karena itu, pelayanan publik harus didukung dengan SDM-SDM unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah dituntut tanggap atas harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah dimana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin well informed sehingga masyarakat ada kecenderungan “menuntut lebih” atas layanan publik. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi

dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Paling tidak ada empat hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital, yaitu:

1. Melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah sehingga digitalisasi dibarengi dengan perubahan proses bisnisnya.
2. Layanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan real time/instan dan diinformasikan kepada masyarakat (kejelasan dan kepastian layanan). Kita bisa melihat bagaimana dalam kondisi pandemi ini masyarakat menginginkan informasi yang real time atas perkembangan penanganannya. Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan eksplorasi cara-cara baru dalam memberikan informasi terkini dan layanan kepada publik sebagai upaya untuk mengelola efek pandemi.
3. Mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antar pegawai dalam operasional serta pemberian layanan kepada masyarakat. Pandemi telah memaksa pola kerja baru di mana pegawai melakukan pekerjaan dari rumah atau Work From Home (WFH). Perkembangan ini menuntut pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dilakukan lebih fleksibel dan dapat diberikan dari manapun.
4. Melakukan modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan.

Berikut ini beberapa penelitian tentang digitalisasi tata kelola pemerintahan yang relevan untuk didesiminasikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

Berdasarkan hasil penelitian I Gede Agus Wibawa dan Lilik Antarini bahwa Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website, SMS Center/Call Center, e-paper, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), e-ktp, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (*rule of law*) bagi para penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparat pemerintah daerah (Wibawa, 2020).

Selanjutnya penelitian Firman Bimasakti Hasilnya menunjukkan bahwa tatakelola pemerintahan berbasis eGov di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang masih tergolong dalam tahap Integration. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sudah menggunakan berbagai digitalisasi pelayanan untuk menunjang tugas – tugasnya, namun hal tersebut belum bisa terlaksana secara optimal. Terdapat 4 dari 5 jenis transformation points yang belum bisa terpenuhi, diantaranya pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan oleh masyarakat, masyarakat tradisional menuju masyarakat online, kesenjangan digital menuju demokrasi digital dan manual berbasis dokumen menuju pemerintahan online. Terdapat 3 faktor yang menjadi penghambat penerapan eGov di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Sedangkan faktor pendorongnya adalah struktur birokrasi yang dimiliki (Bimasakti, 2017).

Penelitian yang lebih spesifik lokus Desa pernah dilakukan oleh Otong Husni Taufiq, dkk dimana penelitian ini dilakukan di desa yang telah menerapkan e-government dalam tata kelola pemerintahannya, salah satunya adalah Desa Panjalu. Desa Panjalu telah menerapkan aplikasi

teknologi informasi sejak tahun 2013 dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan. Untuk mengetahui tata kelola pemerintah berbasis e-government di Desa Panjalu menggunakan konsep solusi dalam e-government menurut Backus yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan e-government dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, swasta/bisnis, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Tahap interaksi yaitu tahap yang memungkinkan pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga, tahap transformasi yang memungkinkan semua layanan pemerintah melalui teknologi informasi yang terintegrasi dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki akun personal untuk dimanfaatkan dalam berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Taufiq, dkk, 2019).

Penelitian tersebut di atas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga harus melakukan berbagai upaya untuk beradaptasi dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Di era new normal ini segala aktivitas pemerintah diarahkan berbasis digital, tak luput juga pemerintah desa. Oleh karena itu penting dilakukan pengembangan berbagai aplikasi/platform yang dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya yaitu pelayanan publik kepada masyarakat. Sangat terbatas sekali pemerintah desa yang sudah berhasil mengembangkan website desa, tetapi banyak juga belum berhasil. Hal ini dikarenakan berbagai faktor baik internal maupun eksternal dari pemerintah desa terkait. Salah satu desa yang belum berhasil mengembangkan aplikasi website desa atau SID yaitu Pemerintah Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Desa Kedungpeluk terletak di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Desa yang memiliki sumber air payau sehingga sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani tambak udang dan ikan payau. Tidak hanya berpotensi pada kondisi alam, tetapi sumber daya manusia termasuk pemerintahan desa yang banyak diduduki oleh generasi muda. Dengan kondisi tersebut membuat Desa Kedungpeluk memiliki peluang guna mengikuti kecanggihan teknologi informasi di era new normal. Desa yang jauh dari sentra kota menimbulkan keterbatasan tersendiri dalam mengakses kabar yang serba digital. Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih mengharuskan sistem pemerintahan desa mengikuti perkembangan tersebut, namun masih ada kendala bahwa rendahnya sumber daya manusia yang memadai khususnya yang memahami bidang teknologi atau IT, masih rendahnya sarana dan prasarana karena minimnya bantuan dana atau finansial, masih dibutuhkannya pendampingan dan pengarahan terkait prosedur atau tutorial dalam menjalankan kegiatan pemerintahan berbasis digital serta dibutuhkannya buku, video tutorial dalam membuat atau menjalankan situs berbasis digital agar mudah dipahami oleh para perangkat Desa Kedungpeluk. Untuk itu harapan yang sangat besar dari semua perangkat Desa Kedungpeluk adanya sebuah solusi untuk mampu membantu pemerintah Desa Kedungpeluk dalam menjalankan pelayanan secara cepat, efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan dan harapan dari pemdes Desa Kedungpeluk maka kegiatan ini akan memberikan sebuah pendampingan dan arahan terkait pengoperasian system pemerintahan desa.

Berdasarkan kajian yang telah ada, maka permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Rendahnya fasilitas atau sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan rendahnya bantuan dan dana fasilitas kegiatan pemerintahan desa untuk melakukan pengembangan aplikasi website desa atau SID.
- b. Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu dan memahami akan teknologi informasi, sehingga dibutuhkannya sebuah pelatihan atau pendampingan secara maksimal dan berkelanjutan agar dapat menjalankan kegiatan pelayanan masyarakat sehingga

masyarakat dapat mengakses secara cepat dan mengetahui semua informasi yang ada terkait kepentingan masyarakat. Terlebih khususnya dalam bidang aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

- c. Tidak adanya informasi dan buku panduan atau tutorial yang secara jelas terkait sistem digitalisasi pemerintahan desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- d. Akses yang terbatas sehingga sulit untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi E-Monografi data administrasi desa Kedungpeluk ini melewati tahapan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi:

a. Perencanaan

Dalam tahap ini dilakukan proses penyusunan acara untuk kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi E-Monografi Data Administrasi Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mulai dari menganalisis masalah hingga menentukan solusi dalam penyelesaian masalah.

b. Pelaksanaan

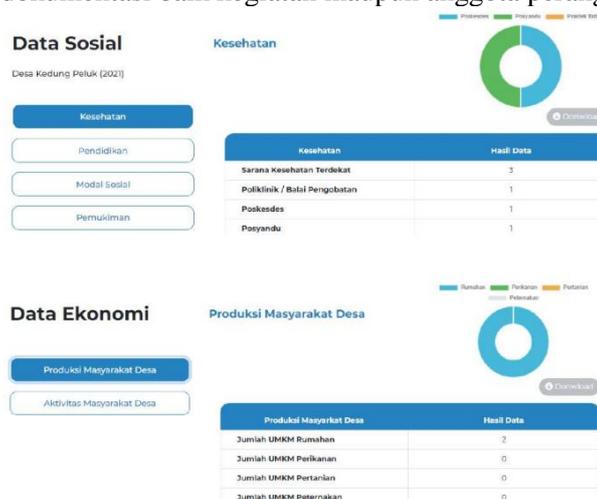
Dalam tahap ini seluruh rencana yang telah disusun mulai dikerjakan mulai dari memberikan materi dan informasi kepada publik dan dokumentasi selama acara berlangsung.

c. Evaluasi

Dalam tahap ini mengukur dan menilai sejauh mana pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan dan sejauh mana kemampuan pengaplikasian digitalisasi layanan desa yang telah di bangun serta keberlanjutan program ini kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam E-Monografi desa Kedungpeluk berisi beberapa informasi penting berupa halaman desa, dalam fitur ini dijelaskan ringkasan mengenai profil desa tersebut. Selain itu juga terdapat fitur halaman data desa dimana dalam fitur tersebut berisi beberapa data baik data umum, data sosial, data ekonomi, data peraturan desa, data perangkat desa, serta galeri. Untuk data umum berupa ringkasan singkat data E-monografi desa, data sosial berupa data yang berhubungan dengan sosial, data ekonomi berupa data yang berhubungan dengan ekonomi, data peraturan desa berupa aturan-aturan atau kebijakan desa, data perangkat desa berupa tampilan struktur birokrasi desa, sedangkan galeri berisi dokumentasi baik kegiatan maupun anggota perangkat desa.

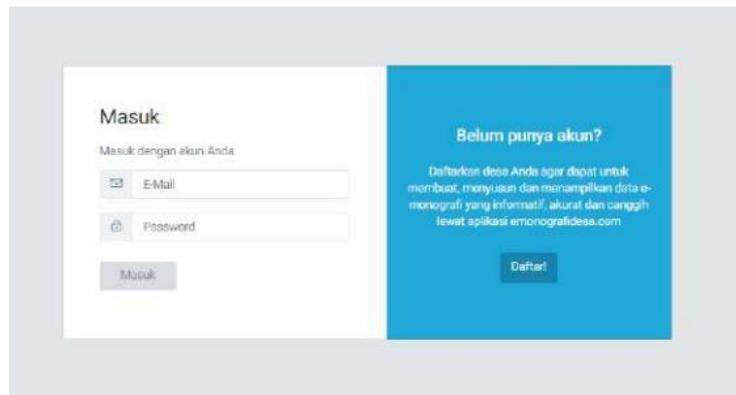


Gambar 1.1
Fitur Data Sosial dan Data Ekonomi E-monografi

Jika melihat dengan seksama, maka tampilan Data Sosial di bagian ke dalam 3 (tiga) bagian, diantaranya :

1. Bagian kiri meliputi sub-menu, sebagai contoh pada Data Sosial, maka sub-menu diantaranya Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, dan Pemukiman
2. Pada bagian kanan terdiri dari diagram lingkaran yang menampilkan prosentasi dari sub-menu yang dipilih dan tabel yang menampilkan data secara lebih rinci.

Dalam halaman pengguna : Admin/RT&RW akan dipaparkan bagaimana cara pengguna dapat melakukan pengisian data E-monografi sehingga dapat memberikan informasi kepada khayalak.



Gambar 1.2
Fitur Pendaftaran

Untuk mendaftar silahkan memilih tombol Daftar, sedangkan apabila Anda sudah memiliki akun sebelumnya silahkan mengisi email & password. Berikut tampilan antar muka halaman pendaftaran.

Gambar 1.3
Fitur Alur Pendaftaran

1. **Form Pilih Jenis Akun** adalah form pilihan, apakah Anda ingin mendaftar sebagai Admin ataukah Anda hanya ingin mendaftar sebagai non-admin (RT / RW) perbedaan keduanya berupa privilege, dan tentunya Admin memiliki privilege lebih lengkap daripada akun RT / RW.
2. **Form Username** adalah form untuk pengisian nama pengguna.
3. **Form Email** adalah form untuk pengisian e-mail Anda yang aktif.

4. **Form Pilih Desa** adalah form pilihan yang mewajibkan pengguna untuk memilih desa mereka masing-masing.
5. **Form Kata Sandi dan Form Ulangi Kata Sandi** adalah form untuk mengisi kata sandi.
6. **Nomor WhatsApp** adalah form yang bertujuan untuk mengisi nomor WhatsApp Anda yang masih aktif.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Monograf dilaksanakan dalam bentuk semacam seminar yang dilaksanakan di kantor desa yang diikuti perangkat desa dan beberapa karang taruna. Pelatihan dan pendampingan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Tahapan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Monograf Sebagai Upaya Adaptasi Desa dalam Pelayanan Publik di Era New Norma di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo melalui seminar dengan merencanakan dan membuat penyusunan edukasi berupa ppt serta penyampaian materi oleh narasumber, pembekalan tim, FGD dengan tim hingga penentuan target capaian.

Tabel 1.1
Program Tahap Perencanaan

Program	Subprogram	Aktivitas	Kegiatan
Berupa seminar Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Monograf	Penyiapan program dan mencari narasumber penyampaian materi	Kegiatan seminar yang diikuti perangkat desa dan karang taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan desain program dan Materi • Membuat pretest dan post test • pembekalan tim, • FGD dengan tim hingga penentuan target capaian.

Untuk substansi materi dirumuskan melalui FGD tim PKM bersama 2 narasumber. Dirumuskan 2 materi yakni pentingnya aplikasi monografi dan alur penggunaan aplikasi monograf.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Monograf Setelah serangkaian proses tahap persiapan telah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, yang merupakan transformasi edukasi. Tahap transformasi merupakan tahap pemberian informasi yang dapat berupa pengetahuan, ketrampilan maupun kecakapan. Berikut ini merupakan bagian dari tahap transformasi:

a. Pengisian Kuesioner Pre-Test

Pengisian pre test ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan peserta pelatihan sebelum diberikan materi. Berikut Gambar Peserta saat registrasi dan diberikan kuesioner pretest:

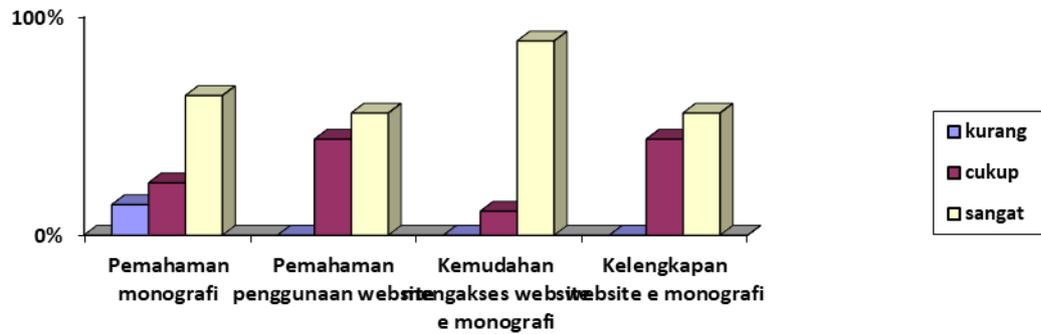


Gambar 1.1

Registrasi dan Penyerahan Kuesioner PreTest

Berikut hasil dari pengisian kuisisioner pre test di sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Kuesioner Pre Test



Data diatas menunjukan 64% dari peserta pelatihan sangat memahami monografi 21% cukup paham dan sisanya kurang paham. Untuk pemahaman penggunaan website 64% merasa sangat paham dan 46% cukup paham. Sedangkan kemudahan mengakses website berjumlah 64% merasa sangat mudah dan sisanya cukup mudah. Terkait kelengkapan website responden merasa 64% sangat lengkap dan 46% cukup lengkap.

b. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini dengan tujuan mengedukasi perangkat desa serta masyarakat terkait penggunaan aplikasi monograf dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan menjalankan aplikasi. Aplikasi ini juga mempermudah masyarakat dalam mencari informasi seputar desa mulai dari data penduduk hingga informasi seputar desa.



Gambar 1.2
Pembukaan PKM



Gambar 1.3
Penyampaian Materi Pertama

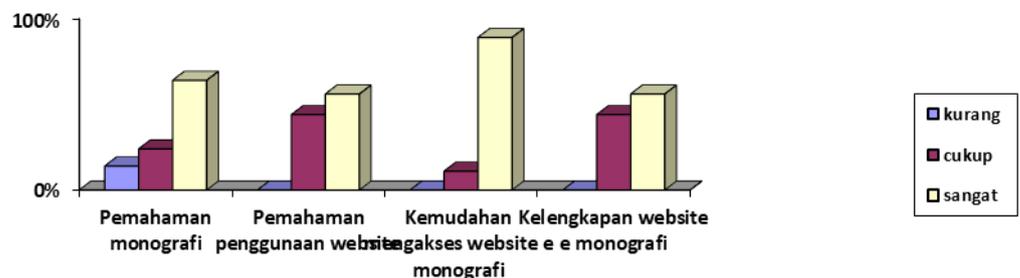


Gambar 1.4
Penutupan PKM

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan aplikasi monograf yaitu dengan melihat kebermanfaatan dari adanya aplikasi memudahkan masyarakat dalam mencari informasi. Kegiatan ini diikuti dan direspon baik oleh masyarakat.

Untuk mengetahui seberapa kebermanfaatan pelatihan dan pendampingan aplikasi monograf maka tim menyebarkan post test dan pre test agar dapat dijadikan perbandingan. Berikut hasil dari pengisian postes:



Tabel 1.3
Hasil Kuesioner

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 56% dari jumlah peserta sangat memahami tentang monografi, sedangkan 44% menjawab cukup paham. Kemudahan mengakses website e monografi berjumlah 89% sangat mudah dan sisanya cukup mudah. Jika dibandingkan dengan jawaban pre test sebelumnya, dipost test terjadi peningkatan pemahaman oleh peserta. Dari data diatas artinya hampir semua peserta pelatihan memahami dan merasa mudah menggunakan e monografi.

SIMPULAN

Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks serta ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas dan clear memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Desa yang jauh dari sentra kota menimbulkan keterbatasan tersendiri dalam mengakses kabar yang serba digital. Adanya perkembangan teknologi yang

semakin canggih mengharuskan sistem pemerintahan desa mengikuti perkembangan tersebut, namun masih ada kendala bahwa rendahnya sumber daya manusia yang memadai khususnya yang memahami bidang teknologi atau IT, masih rendahnya sarana dan prasarana karena minimnya bantuan dana atau finansial, masih dibutuhkannya pendampingan dan pengarahan terkait prosedur atau tutorial dalam menjalankan kegiatan pemerintahan berbasis digital.

PKM ini akan dilaksanakan di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berupa pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi monograf ini diikuti 14 peserta yang terdiri oleh perangkat desa dan karang taruna. Materi yang di paparkan ada dua yakni penyuluhan tentang monograf dan penggunaan aplikasi monograf, tim PKM juga menyebarkan kuesioner post test dan pretest untuk mengetahui seberapa bermanfaat pelatihan dan pendampingan tersebut, dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan tersebut mengedukasi dan bermanfaat

SARAN

Dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, disimpulkan Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam memberikan informasi sehingga diharapkan desa dapat bertransformasi di era new normal sebagai upaya adaptasi desa dalam pelayanan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LPPM Unesa dan Pemerintah Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimasakti, F. (2017). Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government Di Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3), 1–18.
- Chaerul, Andi Anas. 2020. Pelayanan Publik di Era New Normal. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-di-era-new-normal> (diakses pada 02 April 2021 pukul 09.15 WIB).
- Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Taufiq, O. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(1) 145-152.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- United Nations. 2020. 2020 United Nations E-Government Survey. <https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-unitednations-e-government-survey> (diakses pada 2 April 2021 pukul 09.35 WIB).
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju-Pemerintahan-Digital.html> (diakses pada 3 April 2021 pukul 22.35 WIB).
- Wibawa, I. G. A. (2020). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). *Administrasi Publik*, 5(1), 5771